



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA OLEH PEMERINTAH  
PROVINSI JAWA TENGAH (Studi kasus : Perubahan Puri Maerokoco  
menjadi Grand Maerakaca)**

**OLEH :**

**DIVANA ASSYIFADARI**

**3312414081**

**PRODI ILMU POLITIK  
JURUSAN POLITIK KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

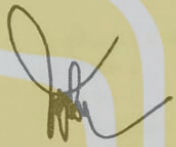
Skripsi ini telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian

Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Desember 2018

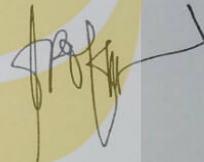
Pembimbing Skripsi I



Drs. Ngabiyanto, M.Si

NIP. 196501031990021001

Pembimbing Skripsi II



Erisandi Arditama, S.IP. MA

NIP. 198705012018031001

Mengetahui:

Ketua Jurusan



UNNES  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Drs. Tijan, M.Si

NIP. 196211201987021001

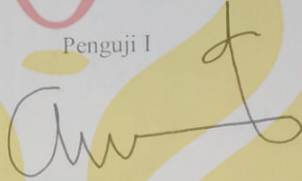
## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : *Senin*

Tanggal : *25 Februari 2019*

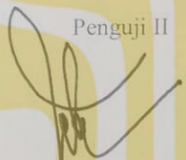
Penguji I



Moh. Aris Munandar, S. Sos., MM.

NIP. 19720724 200003 1 001

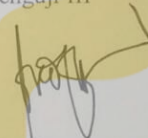
Penguji II



Drs. Ngabiyanto, M.Si

NIP. 19650103 199002 1 001

Penguji III




Erisandi Arditama, S.IP, MA

NIP. 19870501 201803 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M. A.

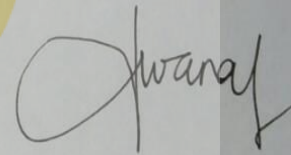
NIP. 19630802 198803 1 001

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar – benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 14 Januari 2019



Divana Assyifadari

NIM. 3312414081



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

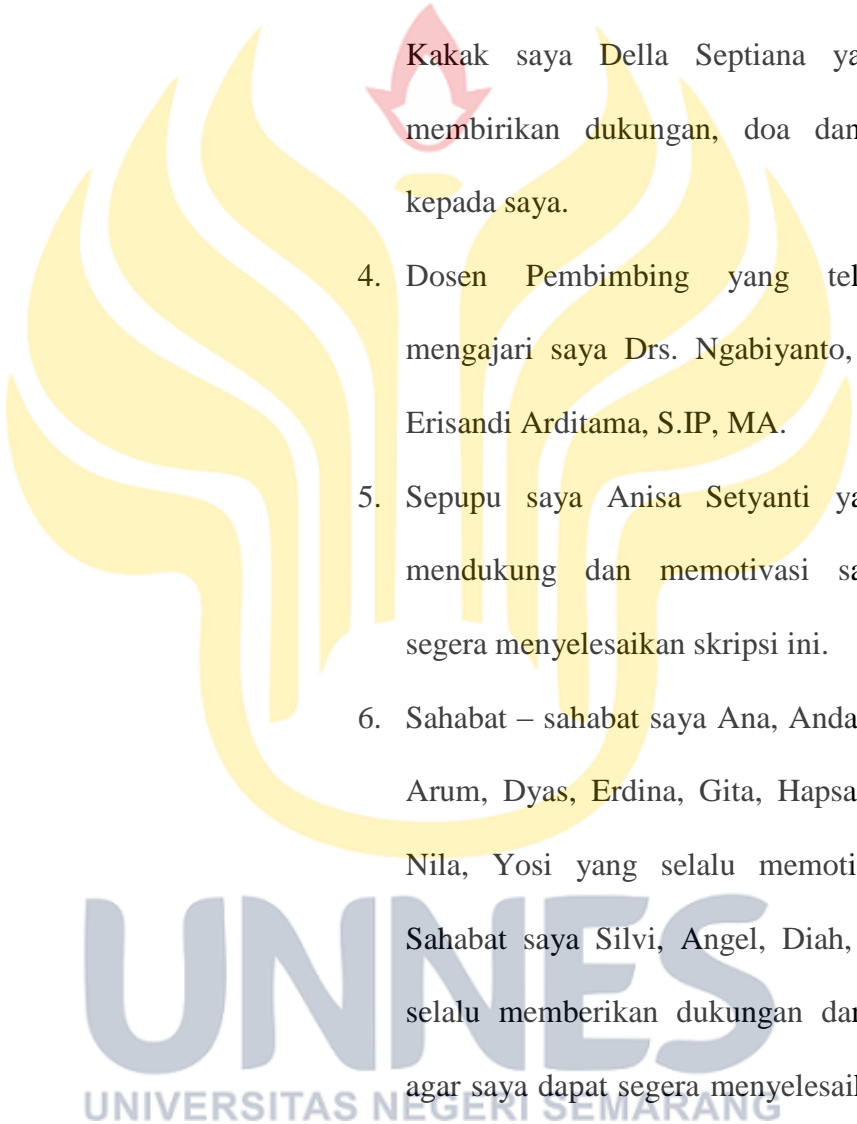
### MOTTO

- Barangsiapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga (Hadist Riwayat Muslim).
- Karena sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS. al-insyirah 5- 6)
- Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. (Thomas Alva Edison)
- Jangan menjadi pemalas, terus berusaha dan berdoa maka yakinlah Allah akan mengabulkan doa hambanya.
- Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.

### PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah Subhanahu Wata'ala yang senantiasa memberikan kekuatan yang luar biasa kepada saya sehingga mampu melewati segala ujian dan rintangan hidup.

- 
- The image contains a large, semi-transparent watermark of the UNNES logo, which consists of a stylized yellow flame or sunburst shape above the text 'UNNES' and 'UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG'.
2. Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menginspirasi saya untuk menjadi manusia yang lebih baik dan sabar.
  3. Bapak saya Sudarta, Ibu saya Titi Relawati, Kakak saya Della Septiana yang selalu membirikan dukungan, doa dan motivasi kepada saya.
  4. Dosen Pembimbing yang telah sabar mengajari saya Drs. Ngabiyanto, M.Si dan Erisandi Arditama, S.IP, MA.
  5. Sepupu saya Anisa Setyanti yang selalu mendukung dan memotivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
  6. Sahabat – sahabat saya Ana, Andayu, Anngi, Arum, Dyas, Erdina, Gita, Hapsari, Jasmin, Nila, Yosi yang selalu memotivasi saya. Sahabat saya Silvi, Angel, Diah, Fila yang selalu memberikan dukungan dan motivasi agar saya dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
  7. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik 2014 yang telah menjadi penyemangat bagi saya.
  8. Almamater UNNES.



## SARI

**Assyifadari, Divana.** 2018. *Kebijakan Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus: Perubahan Puri Maerokoco menjadi Grand Maerakaca)*. Skripsi. Program Studi Ilmu Politik. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I Drs. Ngabiyanto, M.Si dan Dosen Pembimbing II Erisandi Arditama, S.IP, MA. 151 halaman.

**Kata kunci : Kebijakan Publik, BUMD , Pariwisata**

PT. PRPP Jawa Tengah adalah sebuah BUMD Provinsi Jawa Tengah yang memiliki badan hukum Perseroan Terbatas. Karena PT. PRPP merupakan BUMD, maka pemegang saham terbesar adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah mengatur kebijakan publik terkait PT. PRPP dan PT. PRPP harus memberikan deviden kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu jika memang kondisi PT. PRPP sudah layak / memiliki keuntungan baru ada kewajiban untuk memberikan keuntungan. Walaupun lahan PT. PRPP masih sengketa tetapi tidak mempengaruhi dalam pemberian deviden. PT. PRPP Jawa Tengah mengelola objek pariwisata PRPP dan Puri Maerokoco yang sekarang disebut dengan Grand Maerakaca. Rumusan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kebijakan pengembangan pariwisata, studi kasus perubahan Puri Maerokoco menjadi Grand Maerakaca? (2) Bagaimana strategi perubahan Grand Maerakaca? (3) Bagaimana sistem pengelolaan Grand Maerakaca Taman Wisata Budaya Jawa Tengah?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis sumber yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang meliputi teknik reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa: (1) Perubahan konsep dari Puri Maerokoco menjadi Grand Maerakaca berhasil karena setelah dilakukan perubahan berupa pengembangan, penambahan obyek baru dan juga perbaikan seperti perbaikan anjungan yang rusak, jumlah pengunjung mengalami peningkatan yang signifikan. Setelah dilakukan perubahan dan pengelolaan secara baik, baik perubahan sarana, perbaikan fasilitas dan lainnya, jumlah wisatawan terus meningkat. (2) Sistem pengelolaan yang dulu kurang begitu diperhatikan, setelah dilakukan perubahan konsep dilakukan perombakan penuh dalam penataan dan penambahan fasilitas untuk menarik minat pengunjung (3) PT. PRPP selaku pengelola Grand Maerakaca yang merupakan BUMD Jawa Tengah wajib memberikan deviden kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. PT. PRPP selaku pengelola Grand Maerakaca memiliki kewajiban memberika deviden ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu jika memang kondisi PT. PRPP sudah layak / memiliki keuntungan baru ada kewajiban untuk memberikan keuntungan. Walaupun lahan PT. PRPP masih sengketa tetapi tidak mempengaruhi dalam pemberian deviden. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 pasal 9 Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi

Pembangunan (PT. PRPP) mendapatkan sebesar Rp.39.252.200.000 dari modal dasar sebesar Rp. 50.000.000.000. (4) PT. PRPP merupakan BUMD milik Provinsi dan Kabupaten Kota jadi bentuk pertanggung jawabannya melalui rapat umum pemegang saham, yang setiap tahun kita selenggarakan di dalam RUPS. Semua kegiatan progam yang dilaksanakan 1 tahun ke belakang dan rencana progam 1 tahun ke depan yang akan dilaksanakan, di laporkan dan informasikan ke pemegang saham melalui RUPS (rapat umum pemegang saham). Pemerintah tidak terlalu berperan penuh terhadap Grand Maerakaca karena PT. PRPP memiliki rumahnya sendiri. Dalam pengelolaan Grand Maerakaca anantara pihak pengelola dengan pemerintah menerapkan Model Delebiratif. peran analis kebijakan hanya menjadi fasilitator agar masyarakat dapat menemukan sendiri keputusan kebijakan yang akan diambil. Pada dasarnya pihak pengelola Grand Maerakaca mengatur semuanya secara sendiri tetapi dalam proses berkembangnya tetap memerlukan ijin dari pemerintah. (5) Walaupun PT. PRPP selaku pengelola Grand Maerakaca terus mengalami keuntungan sejak 2015, jumlah wisatawan dan pendapatan Grand Maerakaca juga terus meningkat. Tetapi PT. PRPP belum bisa memberikan deviden kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Karena masih memiliki kerugian komulatif yang dialami selama Grand Maerakaca belum berkembang. Pada tahun 2019 PT. PRPP sudah akan mulai membayarkan deviden kembali ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena sudah bisa menutupi kerugian komulatifnya.

Saran yang diajukan peneliti adalah untuk pihak pengelola walaupun Grand Maerakaca sudah berkembang cukup bagus dan memiliki inovasi – inovasi baru. Kepada pihak Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, Sebaiknya pemerintah memberikan kontribusi penuh kepada wisata yang cukup potensial untuk berkembang seperti Grand Maerakaca.





## ABSTRACT

**Assyifadari, Divana.** 2018. *Tourism Development Policy by the Government of Central Java Province (Case Study: Change of Maerokoco Castle to Grand Maerakaca)*. Undergraduate Thesis. Political Science Program. Department of Politics and Civics. Faculty of Social Science. Semarang State University. The First Supervisor is Drs. Ngabiyanto, M.Si and the Second Supervisor is Erisandi Arditama, S.IP, MA. 151 pages.

**Keywords: Public Policy, Regional Owned Enterprises, Tourism**

PT. PRPP Central Java is a Central Java Provincial Regional Owned Enterprises that has a legal entity Limited Liability Company. Because PT. PRPP is a Regional Owned Enterprises, the largest shareholder is the Central Java Provincial Government. The government regulates public policies related to PT. PRPP and PT. PRPP must provide dividends to the Central Java Provincial Government, if indeed the condition of PT. PRPP has the right / has a new advantage, there is an obligation to provide benefits. Although the land of PT. PRPP is still a dispute but does not affect the provision of dividends. PT. PRPP Central Java manages the PRPP tourism object and Maerokoco Castle which is now called the Grand Maerakaca. The formulation of this study are: (1) How is the tourism development policy, a change in case studies of Maerokoco Castle to become the Grand Maerakaca? (2) How is the strategy for changing Grand Maerakaca? (3) How is the management system of the Grand Maerakaca Central Java Cultural Tourism Park ?.

The research uses qualitative method. The type of data is primary data and secondary data. The data use observation, interview and documentation techniques. The analysis use qualitative such as reduction of data, presentation of data and conclusion of data.

The results showed that: (1) Changes in the concept from Maerokoco Castle to Grand Maerakaca were considered successful because after changes were made in the form of development, addition of new objects and repairs such as repairs to damaged platforms, the number of visitors experienced a significant increase. After making changes and good management, both changes in facilities, facilities and other improvements, the number of tourists continues to increase. (2) The management system that was formerly not so much noticed, after a change of concept was carried out a complete overhaul of the arrangement and addition of facilities to attract visitors' interest (3) PT. PRPP as the manager of Grand Maerakaca which is a Central Java Regional Owned Enterprises must provide dividends to the Central Java Provincial Government. PT. PRPP as the manager of Grand Maerakaca has an obligation to provide dividends to the Central Java Provincial Government, namely if indeed the condition of PT. PRPP has the right / has a new advantage, there is an obligation to provide benefits. Although the land of PT. PRPP is still a dispute but does not affect the provision of dividends. Based on Central Java Provincial Regulation Number 14 of 2013 Article 9 Limited Liability Company Recreation and Promotion Promotion Center (PT. PRPP) received Rp.39,252,200,000 from authorized capital of Rp. 50,000,000. (4)

PT. PRPP is a Provincial and City-Owned Regional Owned Enterprises which is a form of accountability through a general meeting of shareholders, which we hold every year at the general meeting of shareholders. All program activities carried out 1 year back and plans for the next 1 year program to be implemented, are reported and informed to shareholders through a GMS (general meeting of shareholders). The government does not play a full role in Grand Maerakaca because PT. PRPP has its own house. In the management of Grand Maerakaca, the management and the government applied the Delebirative Model. the role of policy analysts is only to be a facilitator so that the community can find out for themselves the policy decisions that will be taken. Basically the manager of the Grand Maerakaca regulates everything on its own but in the process of developing it still requires permission from the government. (5) Even though PT. PRPP as the manager of Grand Maerakaca has continued to experience profits since 2015, the number of tourists and Grand Maerakaca income has also continued to increase. But PT. PRPP has not been able to provide dividends to the Central Java Provincial Government because it still has cumulative losses experienced during the Grand Maerakaca development. In 2019 PT. PRPP will start paying dividends back to the Central Java Provincial Government because it can cover the cumulative losses.

Suggestions put forward by researchers are for managers even though Grand Maerakaca has developed quite well and has new innovations. To the Central Java Department of Youth Sports and Tourism, the government should make a full contribution to tourism which is quite potential to develop such as Grand Maerakaca.

## PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perubahan Puri Maerokoco menjadi Grand Maerakaca untuk Meningkatkan Jumlah PAD dan Jumlah Wisatawan di Jawa Tengah”. Penyelesaian skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (UNNES). Alhamdulillah selama penyusunan skripsi, mendapat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fatkhur Rohman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang.
4. Drs. Ngabiyanto, M.Si dan Erisandi Arditama, S.IP, MA, Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Politik dan Kewarganegaraan dan seluruh staf serta karyawan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
6. Ibu Minaeni Hayayu, SH Manajer Personalia PT. PRPP Jawa Tengah yang telah memberikan informasi dan data penelitian.

7. Bapak Eka Pramudya Adi, SSN narasumber dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah yang telah memberikan informasi dan data penelitian.
8. Bapak Syahrul Akbar narasumber dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah yang telah memberikan informasi dan data penelitian.
9. Ibu Hanifah Staf Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan informasi dan data penelitian.
10. Bapak dan Ibu saya yang sudah memberikan motivasi, semangat dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
11. Kakak saya Della Septiana yang selalu mendukung, memotivasi dan mendoakan saya.
12. Sahabat – sahabat saya selama kuliah yang selalu mendukung dan bersama saya selama kuliah. Sahabat saya dari SD sampai SMA yang selalu mendukung dan memberikan motivasi agar saya semangat mengerjakan skripsi ini.
13. Teman-teman Program Studi Ilmu Politik angkatan 2014 serta semua pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu selama proses pengerjaan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

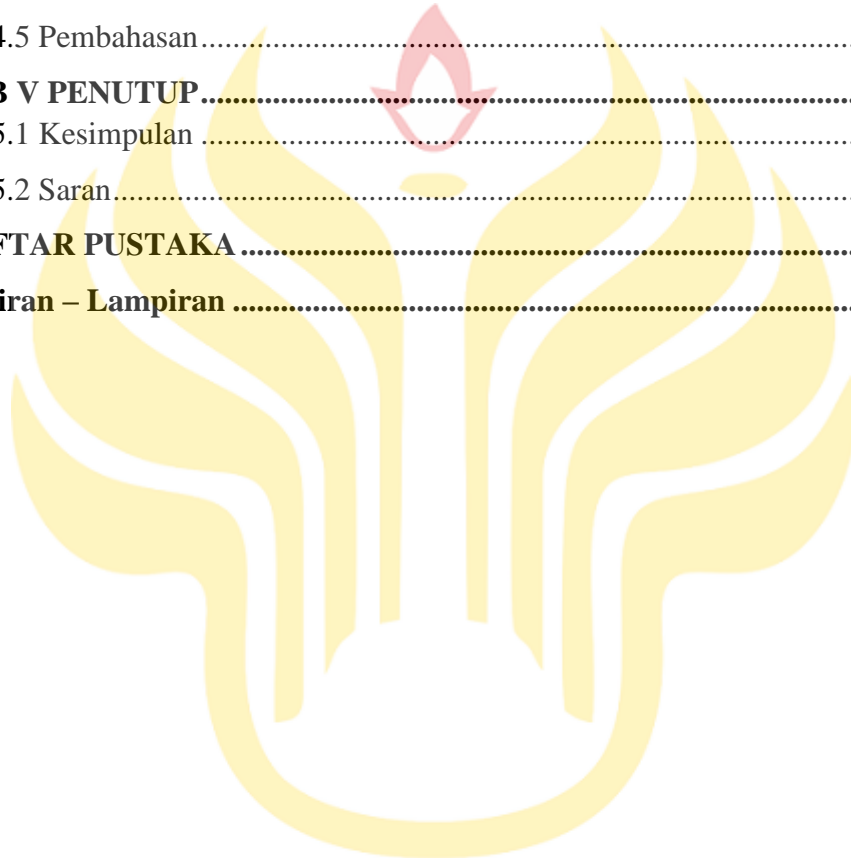
Semarang, 14 Januari 2019

Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SARI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Batasan Istilah.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR.....</b>	<b>16</b>
2.1 Pariwisata .....	16
2.2 Kebijakan Publik.....	24
2.3 Penelitian yang Relevan .....	43
2.4 Kerangka Berpikir .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
3.1 Latar Penelitian .....	47
3.2 Fokus Penelitian .....	47
3.3 Sumber Data.....	48
3.4 Alat dan Teknik Pengumpulan Data .....	49
3.5 Uji Validitas Data.....	51
3.6 Teknik Analisis Data.....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>

4.1 Gambaran Umum PT PRPP Jawa Tengah.....	55
4.2 Kebijakan pengembangan pariwisata (studi kasus perubahan Puri Maerokoco menjadi Grand Maerakaca .....	60
4.3 Startegi perubahan Grand Maerakaca .....	65
4.4 Sistem pengelolaan Grand Maerakaca .....	75
4.5 Pembahasan.....	80
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
5.1 Kesimpulan .....	97
5.2 Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>
<b>Lapiran – Lampiran .....</b>	<b>102</b>



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



## DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DAU	: Dana Alokasi Umum
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
Pemprov	: Pemerintah Provinsi
PERDA	: Peraturan Daerah
RAPBN	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RENJA	: Rencana Kerja
RENSTRA	: Rencana Startegis
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RUU	: Rancangan Undang – Undang
SDM	: Sumber Daya Manusia
UU	: Undang – Undang
UUD	: Undang – Undang Dasar



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Kunjungan Grand Maerakaca Taman Mini Jawa Tengah.....	63
Tabel 4.2 Pendapatan Diperoleh dari Tiket Masuk.....	64



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Proses Implementasi.....	28
Bagan 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian.....	46
Bagan 4.1 Susunan Organisasi PT PRPP Jawa Tengah.....	59
Bagan 4.2 Tata Kelola Grand Maerakaca berbasis Multi Aktor.....	78



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Alur analisis data model interaktif Miles dan Huberman.....64



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi / Tugas Akhir Semester Gasal / Genap
- Lampiran 2 : Surat izin penelitian
- Lampiran 3 : Instrumen Penelitian
- Lampiran 4 : Pedoman wawancara
- Lampiran 5 : PAD Jawa Tengah
- Lampiran 6 : Jumlah wisatawan Jawa Tengah
- Lampiran 7 : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 pasal 9 tentang Pernyataan modal Pemerintah Daerah kepada Bada Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga.
- Lampiran 8 : Master Plan Pengembangan Grand Maerakaca
- Lampiran 9 : Dokumentasi Kegiatan



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pariwisata tidak bisa lepas dari politik, karena pariwisata dan politik berkaitan satu sama lain. Dalam pelaksanaan pariwisata harus dilakukan berdasarkan kebijakan dari Pemerintah. Pariwisata sangat menarik untuk dibahas bagi pengkaji ilmu politik, karena kita bisa melihat relevansi pemerintah terhadap pariwisata. Relevansi pemerintah dengan pariwisata antara lain bagaimana pemerintah menetapkan peraturan atau kebijakan untuk mengembangkan pariwisata. Dalam konteks Grand Maerakaca, relevansinya dengan pemerintah adalah Grand Maerakaca berada dibawah naungan PT. PRPP yang merupakan BUMD Jawa Tengah. Grand Maerakaca yang merupakan pariwisata di bawah naungan PT. PRPP Jawa Tengah memiliki kewajiban melakukan keterbukaan penuh dan memberikan keuntungan terhadap Pemerintah. Sedangkan Pemerintah mengatur dalam penetapan kebijakan.

Perkembangan industri pariwisata merupakan suatu fenomena yang menarik, meskipun pariwisata juga merupakan sektor yang sangat sensitif terhadap perubahan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal yang sangat berpengaruh terhadap jumlah dan minat wisatawan untuk mengunjungi suatu negara, provinsi maupun daerah. Industri tersebut secara langsung memberikan dampak terhadap ekonomi, sosial dan budaya Gegal (dalam Suryadana, et al. 2015:33).



Menurut definisi yang luas pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Pariwisata adalah salah satu jenis industry baru mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor – sektor produktivitas lainnya. Selanjutnya, sebagai sektor yang kompleks ia juga meliputi industry – industry klasik yang sebenarnya seperti industry kerajinan dan cinderamata. Nyoman Suwandi (dalam Damanik, et al. 2005:18)

Pariwisata adalah salah satu dari industri baru, yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan” Wahab (dalam Damanik, et al. 2005:21 ). Banyak pihak yang berharap bahwa sektor pariwisata akan mampu menjadi pengganti pemasok devisa utama setelah menurunnya peran migas. Dibalik harapan yang begitu besar, Indonesia memang memiliki potensi alam yang luar biasa melimpah dan benar benar layak untuk dibanggakan sebagai tambang industry jasa pariwisata yang masih luas dan belum banyak terjamah. Dengan keragaman kekayaan alam inilah pariwisata diharapkan mampu melakukan pengemasan yang berkualitas. Pendayagunaan itu secara maksimal harus direkayasa sedemikian rupa agar tidak merusak penyangga kekayaan alam budaya. Sebaliknya harus mampu secara optimal member nilai tambah ekonomis bagi setiap daerah pemilik potensi wisata.

Pariwisata diyakini masih tetap menjadi unggulan dan tumpuan bagi Indonesia. Coba saja kita simak, betapa banyak pernyataan yang muncul dan lontaran harapan dari birokrat maupun praktisi pariwisata terhadap sektor ini, ketika krisis melanda negeri ini. Bahkan para pakar maupun praktisi diluar pariwisata pun memberikan dukungan kepada sektor pariwisata yang dipercaya mampu menjadi pioner pemulihan perekonomian kita. Pemerintah sebagai institusi yang menjalankan fungsi fasilitasi, maka pemerintah menjadi pihak pertama yang dituntut untuk menginisiasi arahan – arahan dan perumusan kebijakan yang mendorong pemangku kepentingan lainnya merancang program – program yang memenuhi criteria kesesuaian. Lebih jelasnya kebijakan yang dirumuskan hendaknya mampu mendorong semua pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan perannya sehingga terbuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh distribusi dan redistribusi sumberdaya pariwisata.

Dari berbagai analisis yang dilakukan para ahli ( de Kadt, 1997; Mathiesson dan Wall, 1982; Luebben, 1995; Max, 2004) akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa sumbangan pariwisata yang secara signifikan pada perkembangan ekonomi suatu Negara atau daerah tampak dalam tiga bentuk yakni: perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan(devisa) dan pemerataan pembangunan antar wialayah. Pariwisata adalah salah satu sektor ekonomi yang berperan dalam peningkatan struktur ekonomi dan proses pembangunan negara. Karena sektor pariwisata dapat meningkatkan perolehan devisa negara yang berupa pajak, dari para wisatawan yang berkunjung maupun pajak dari fasilitas sosial di daerah objek wisata. Selain itu terdapat manfaat lain

yang diberikan oleh sektor industri pariwisata antara lain dari segi budaya. Dengan pesatnya industri pariwisata akan membawa pemahaman melalui interaksi wisatawan asing dengan masyarakat lokal sehingga dapat mengenal dan menghargai budaya masyarakat setempat dan memahami latar belakang budaya lokal yang dianut oleh masyarakat tersebut sekaligus sebagai sarana yang tepat untuk mempromosikan kebudayaan daerah dan kekayaan alam daerah tujuan wisata tersebut.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mempunyai prospek yang cerah dan berpotensi sangat besar untuk dikembangkan, karena pariwisata merupakan salah satu kebutuhan yang vital bagi manusia. Dengan berwisata orang cenderung dapat memuaskan hasrat ingin tahu, mengembalikan kesegaran pikiran dan jasmaninya pada alam dan lingkungan yang berbeda dengan alam lingkungannya sehari-hari, menambah daya kreatifitasnya, berbelanja, beribadah dan alasan lainnya. Dengan meningkatnya waktu luang atau dengan kata lain berkurangnya jam kerja seseorang, maka akan meningkatkan aktivitas kepariwisataan. Pariwisata juga menawarkan jenis produk dan wisata yang beragam, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata buatan, wisata edukasi.

Pariwisata merupakan sebuah sektor industri hiburan, yang menjadi tujuan seseorang atau kelompok untuk memperoleh kepuasan dan kesenangan yang dapat mengusir kebosanan dan dapat menghibur hati. Pariwisata dalam dunia modern pada hakekatnya merupakan suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memberi hiburan jasmani maupun rohani setelah beberapa waktu berkerja atau

beraktivitas untuk mengunjungi tempat rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beranekaragam. Perkembangan sektor pariwisata dewasa ini menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat wisata yang ada. Berkembangnya sektor pariwisata juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan transportasi. Dengan adanya kemajuan teknologi dan transportasi akan memudahkan seseorang melakukan kegiatan pariwisata. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat sumber daya alam yang berlimpah, baik daratan, udara, maupun di perairan. Selain itu, Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Hal itu terwujud dari banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah di berbagai tempat. Semua potensi tersebut mempunyai peranan yang penting bagi pengembangan kepariwisataan khususnya wisata alam dan wisata yang bernilai sejarah.

Kekayaan dan keragaman alam dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia, merupakan modal dasar dalam pembangunan. Keberagaman kekayaan sumber daya alam, seperti potensi alam, flora, fauna, keindahan alam serta bentuknya yang berkepulauan kaya akan adat istiadat, kebudayaan, dan bahasa sehingga memiliki daya tarik untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Dari daya tarik ini akan mendorong pemerintah untuk melakukan pembangunan pada industri pariwisata. Menurut Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha

dan memperoleh manfaat serta mampu menghasdapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Jawa Tengah adalah provinsi yang terletak dibagian tengah pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah dikenal sebagai tempat yang paling mengagumkan dalam hal keindahan panorama, sejarah, peninggalan seni warisan leluhur serta menjadi pusat kebudayaan Jawa, daerah ini memang terkenal dengan tradisi masyarakat yang masih bertahan hingga kini, yang mempunyai adat dan tradisi serta berbagai atraksi wisata yang menjadikan salah satu karakter keunikan tempat wisata di Jawa Tengah. Dari segi sektor pariwisata, provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali daerah potensi objek wisata. Karena Jawa Tengah memiliki objek wisata yang unik dan beragam serta menarik untuk dikunjungi, mulai dari obek wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, wisata sejarah, dan wisata edukasi.

Kota Semarang merupakan Ibukota Jawa Tengah yang menyimpan berbagai macam potensi dan keunikan yang dapat dinikmati. Pariwisata di kota Semarang memiliki potensi yang cukup besar karena Kota Semarang memiliki banyak tempat yang mengandung berbagai macam nilai sejarah dan budaya yang dapat dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata Jawa Tengah. Semarang memiliki keunikan dari bentuk geologisnya yang jarang ditemui di kota-kota lain, Semarang terbagi menjadi daerah dengan dua iklim, yaitu iklim panas dan sejuk. Iklim yang panas terjadi karena kota berada di pesisir pantai Semarang yang merupakan dataran rendah, sedangkan iklim yang sejuk didapat karena sebagian Kota Semarang letaknya berada tidak jauh dari gunung Ungaran.

Kota Semarang selama ini dikenal sebagai kota industri dan bisnis, tetapi bukan berarti Semarang tidak memiliki tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Kota Semarang memiliki banyak sekali industri pariwisata yang unik dan dapat dinikmati setiap orang dari berbagai kalangan mulai dari wisata alam seperti Pulau Tirangcawang, Pulau Tirang, Pantai Marina, Pantai Maron, Goa Kreo dan Taman Lele. Sedangkan wisata sejarah di Kota Semarang meliputi Museum MURI, Museum Nyonya Meneer, Museum Mandala Bhakti, Museum Perkembangan Islam Jawa Tengah, Tugu Muda, Candi Tugu, Kota Tua Semarang dan Lawang Sewu. Selain wisata alam dan wisata sejarah Kota Semarang juga memiliki wisata religius antara lain Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Masjid Baiturrahman Semarang, Klenteng Sam Po Kong, Gereja Blenduk, Gereja Katedral Semarang, Gereja JKI Injil Kerajaan Semarang, Vihara Mahavira Graha dan Pagoda Buddhagaya. Kota Semarang tentunya juga mempunyai wisata yang bisa dinikmati bersama keluarga seperti Taman Wonderia, Kebun Binatang Mangkang, Taman Mini Jawa Tengah (Maerokoco) yang sekarang berubah menjadi Grand Maerakaca dan Water Blaster. Untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan, terdapat banyak layanan yang menunjang untuk melakukan wisata seperti adanya fasilitas hotel di Semarang dari yang paling murah hingga hotel berbintang. Transportasi yang mudah dan nyaman dengan biro perjalanan yang siap memandu perjalanan para wisatawan.

Puri Maerokoco Taman Wisata Budaya Jawa Tengah atau yang lebih dikenal masyarakat luas dengan sebutan Puri Maerokoco. Puri Maerokoco adalah salah satu objek wisata keluarga sekaligus menjadi wisata edukasi yang cukup



populer di Kota Semarang. Puri Maerokoco biasa dikenal dengan sebutan Taman Mini Indonesia Indah versi Jawa. Tengah Puri Maerokoco Taman Wisata Budaya Jawa Tengah adalah salah satu bagian yang tak terpisahkan dari seluruh kawasan PRPP yang berada di Jalan Yos Sudarso kompleks Tawang Mas Semarang yaitu kompleks pengembangan kawasan baru di Semarang Barat yang terdiri dari pemukiman, perkantoran, perdagangan, olahraga, rekreasi dan pariwisata. Nama Puri Maerokoco diambil dari salah satu bagian epos Mahabarata yang menceritakan tentang keinginan salah seorang Dewi memiliki seribu bangunan hanya dalam satu malam. Pembangunan Puri Maerokoco dilaksanakan antara tahun 1988 hingga tahun 1993. Sedangkan fasilitas rekreasi sendiri diselesaikan pada tahun 1996. Puri Maerokoco merupakan tempat wisata yang memiliki nilai-nilai edukasi dan budaya sehingga banyak keluarga yang berkunjung ke tempat ini untuk memberikan tambahan pengetahuan dan untuk memperkenalkan budaya nusantara terutama Jawa Tengah kepada anak-anaknya. Puri Maerokoco sering kali disebut sebagai cara yang paling mudah untuk mengelilingi Jawa Tengah karena menampilkan berbagai rumah adat dari seluruh penjuru Jawa Tengah baik Kota maupun Kabupaten.

Pembangunan Puri Maerokoco Taman Wisata Budaya Jawa Tengah dilaksanakan antara tahun 1988 – 1993, sedangkan fasilitas rekreasi yang lain diselesaikan tahun 1996. Ide pengembangan ini dari Bapak Gubernur dalam rangka memperkenalkan wilayah dan budaya atau jati diri Jawa Tengah dengan murah, singkat dan mudah maka dibangunlah Jawa Tengah dengan skala mini yang mirip dengan sesungguhnya. Selain itu Puri Maerokoco Taman Wisata

Budaya Jawa Tengah ini diharapkan dapat menjadi tempat rekreasi andalan Jawa Tengah dan yang lebih penting lagi taman ini diharapkan dapat menjadi ajang promosi potensi Daerah Tingkat II seluruh Jawa Tengah.

Sebagai Taman Mini Jawa Tengah, Puri Maerokoco diwujudkan dengan pulau yang merupakan gambaran miniatur Jawa Tengah dibatasi oleh danau di utara dan selatan sebagai gambaran laut Jawa dan Samudra Indonesia dan lahan Jawa Barat serta Jawa Timur diisi dengan tanaman langka. Taman Mini Jawa Tengah, Puri Maerokoco menghadirkan semua rumah adat yang biasa disebut sebagai anjungan yang terdiri dari 35 anjungan, Puri Maerokoco berusaha menampilkan bentuk 35 kabupaten / kota di seluruh Jawa Tengah yang dibuat hampir mirip dengan keadaan asli di lapangan namun bentuknya bersekala lebih kecil. Selain itu di Puri Maerokoco pengunjung juga dapat melihat berbagai macam adat istiadat, budaya ciri khas dari setiap rumah tradisional, tarian-tarian, objek wisata, pakaian, peralatan adat dan lain-lain yang tentunya disajikan dari setiap anjungan masing-masing daerah.

Parameter keberhasilan sebuah objek wisata yaitu salah satunya dengan melihat pertumbuhan jumlah wisatawan. Karena dengan peningkatan jumlah wisatawan, otomatis akan diikuti oleh perkembangan sarana dan prasarana pendukung objek wisata. Akan tetapi, jumlah wisatawan Puri Maerokoco cenderung menurun secara terus-menerus. Penurunan jumlah wisatawan tersebut terjadi karena adanya pengaruh keputusan berkunjung wisatawan terhadap objek wisata lain. Karena saat ini banyak tempat wisata yang tidak kalah menarik yang memberikan wahana yang menarik bagi para pengunjung. Selain itu penurunan

jumlah wisatawan ini, salah satunya disebabkan oleh kurangnya perhatian pengelola terhadap lingkungan Puri Maerokoco, banyak wahana wisata yang tidak terawat dengan baik selain itu sering terjadi banjir rob yang masih belum bisa teratasi dengan baik dan menjadi sebuah bencana setiap tahun dikala musim penghujan tiba.

Berbagai langkah telah ditempuh pengelola Puri Maerokoco agar mampu meningkatkan jumlah pengunjung di obyek wisata Puri Maerokoco. Salah satu kebijakan yang telah dijalankan oleh pengelola adalah dengan mengirimkan surat setiap bulannya ke sekolah-sekolah terutama ke Sekolah Dasar di Jawa Tengah. Selain itu Puri Maerokoco saat ini tengah dikembangkan dan berubah dengan menggunakan Konsep baru yaitu Grand Maerakaca. Komisaris Utama PT PRPP Agus Utomo bersama jajaran manajemen memikirkan menghidupkan Puri Maerokoco. Pada tahun 2016 telah dibuka Tracking Mangrove Maerakaca. Tracking Mangrove Maerakaca sendiri sebenarnya bukan sesuatu yang baru, karena sudah lama ada dan dengan ukuran yang sudah sangat rindang. Namun dengan tambahan trek dari bambu di sebelah timur Jembatan Harapan dengan panjang 135 meter. Trekking Mangrove dibangun pada bulan November 2016 dan dibuka sebulan kemudian pada Desember 2016 sebagai objek wisata baru di Maerokoco. Jalur Trekking dibuat dari bambu berbentuk setengah lingkaran hanya satu meter dari permukaan air. Pejalan kaki dapat berjalan di dalam dan sekitar pohon bakau yang rimbun serta berfoto dengan latar nuansa hijau dan tepi laut. Untuk menarik penonton yang lebih besar, pengelola terus menyelenggarakan event-event yang menarik dari olahraga memancing, festival

budaya dan hiburan musik. Tak ketinggalan Malam Minggu Maerokoco M2M yang merupakan pengaturan panggung terbuka di tepi danau dengan hutan mangrove sebagai latar belakang alam diharapkan menjadi hotspot berikutnya untuk tujuan ekowisata Semarang.

Banyak hal yang harus segera diperhatikan oleh pengelola Puri Maerokoco supaya jumlah wisatawan tidak kembali menurun di tahun berikutnya. Harapannya setelah ini (Grand Maerakaca) jadi destinasi unggulan Jateng dan memperkaya destinasi kota Semarang. Grand Maerakaca tidak hanya tentang rekreasi tapi juga konservasi alam, budaya serta wisata edukasi. Perlu juga berbagai event untuk menghidupkan suatu kawasan dan tujuan wisata khas kota Semarang. Dengan dilakukannya perkembangan Grand Maerakaca yang cukup signifikan tentu saja dapat berpengaruh dalam berbagai hal, salah satunya peningkatan jumlah wisatawan yang meningkat. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan tentu saja juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan deskripsi yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perubahan Puri Maerokoco yang selain meningkatkan jumlah wisatawan tetapi juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penulis tertarik untuk meneliti tentang Grand Maerakaca yang merupakan BUMD Jawa Tengah yang dikelola oleh PT PRPP Jawa Tengah. Penulis tertarik meneliti tentang perubahan yang terjadi di Grand Maerakaca dan bagaimana relasi dengan pemerintah. Melalui tulisan ini diharapkan memberikan perspektif baru yang menjelaskan timbal balik yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta yang memiliki atau mengelola sebuah pariwisata. Maka dari itu penulis memilih

judul: **KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA OLEH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH (Studi kasus : Perubahan Puri Maerokoco menjadi Grand Maerakaca)**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pengembangan pariwisata, studi kasus perubahan Puri Maerokoco menjadi Grand Maerakaca?
2. Bagaimana startegi perubahan Grand Maerakaca?
3. Bagaimana sistem pengelolaan Grand Maerakaca Taman Wisata Budaya Jawa Tengah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kebijakan pengembangan pariwisata, studi kasus perubahan Puri Maerokoco menjadi Grand Maerakaca?
2. Untuk mengetahui perubahan Grand Maerakaca?
3. Untuk mengetahui sistem pengelolaan Grand Maerakaca Taman Wisata Budaya Jawa Tengah?

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

- 1.4.1 Secara teoretis, manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya khasanah Ilmu Politik.
- b. Menambah pustaka ilmu pengetahuan sosial, khususnya mengenai kajian Perubahan Puri Maerokoco menjadi Grand Maerakaca untuk Meningkatkan Jumlah PAD dan Wisatawan di Jawa Tengah.
- c. Sebagai bahan acuan, referensi, dan bahan pengembangan apabila akan dilakukan penelitian lanjutan.

1.4.2 Secara praktis, manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan informasi, menambah pengetahuan, dan wawasan bagi pembaca tentang Perubahan Puri Maerokoco menjadi Grand Maerakaca untuk Meningkatkan Jumlah Wisatawan dan PAD di Jawa Tengah.

### **1.5 Batasan Istilah**

Pada penelitian ini perlu diberikan batasan istilah mengenai hal-hal yang diteliti untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan atau menafsirkan serta untuk membatasi permasalahan yang ada.

#### **1.5.1 Pariwisata**

Apabila ditinjau secara etimologi Yoeti (dalam Suryadana, et al. 2015:30) istilah pariwisata sendiri berasal dari bahasa sansekerta yang memiliki persamaan makna dengan tour, yang berarti berputar – putar dari suatu tempat ketempat lain. Suwantoro (dalam Suyitno, 2001:37) Pariwisata adalah Perubahan tempat tinggal seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah.

#### **1.5.2 Wisatawan**

Wisatawan adalah seseorang yang melakukan perjalanan untuk sementara waktu, tidak kurang selama 24 jam, dan ia semata-mata sebagai konsumen, bukan mencari nafkah atau bekerja tetap ditempat yang ia kunjungi (Yoeti, 1996:47). Wisatawan itu adalah orang yang ingin memenuhi kebutuhan setelah kebutuhan-kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Kebutuhan itu antara lain seperti melihat obyek wisata, tata cara hidup masyarakat bangsa lain dan hasil kebudayaannya.

### 1.5.3 Puri Maerokoco

Puri Maerokoco Taman Wisata Budaya Jawa Tengah atau yang lebih dikenal masyarakat luas dengan sebutan Puri Maerokoco. Puri Maerokoco adalah salah satu objek wisata keluarga sekaligus menjadi wisata edukasi di Kota Semarang. Puri Maerokoco biasa dikenal dengan sebutan Taman Mini Indonesia Indah versi Jawa. Taman Mini Jawa Tengah, Puri Maerokoco menghadirkan semua rumah adat yang biasa disebut sebagai anjungan yang terdiri dari 35 anjungan, Puri Maerokoco berusaha menampilkan bentuk 35 kabupaten / kota di seluruh Jawa Tengah yang dibuat hampir mirip dengan keadaan asli di lapangan namun bentuknya bersekala lebih kecil.

### 1.5.4 Grand Maerakaca

Grand Maerakaca merupakan perkembangan konsep dari Puri Maerokoco yang diresmikan akhir tahun 2016 banyak perubahan di Grand Maerakaca seperti adanya tracking mangrove dan pengelola terus menyelenggarakan event-event yang menarik dari olahraga memancing, festival budaya dan hiburan musik. Tak ketinggalan Malam Minggu Maerokoco M2M yang merupakan pengaturan



panggung terbuka di tepi danau dengan hutan mangrove sebagai latar belakang alam diharapkan menjadi hotspot berikutnya untuk tujuan ekowisata Semarang.

#### 1.5.5 Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata tidak lepas dari perkembangan politik, ekonomi, sosial dan pengembangan disektor lainnya, maka didalam pengembangan pariwisata dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu. Dari pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah suatu proses yang terjadi secara terus menerus, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya terhadap ancaman yang ada untuk dapat berkembang dalam mencapai tujuan individu dalam organisasi dan tujuan organisasi secara keseluruhan Demartoto (dalam Suryadana, et al. 2015:41). Pengembangan Pariwisata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan yang terjadi dari Puri Maerokoco menjadi Grand Maerokoco untuk meningkatkan jumlah wistawan.

#### 1.5.6 Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan merupakan suatu proses yang membantu merumuskan kebijakan - kebijakan dan pencapaian tujuan. Peran pemerintah dalam pengelolaan pariwisata, seperti melaksanakan pembinaan kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan (Hayun, 2001:30). Pengelolaan wisata yang dimaksud dalam laporan ini adalah, pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola yaitu PT. PRPP dan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

#### 2.1 Pariwisata

Apabila ditinjau secara etimologi Yoeti (dalam Suryadana, et al. 2015:30) istilah pariwisata sendiri bersal dari bahasa sansekerta yang memiliki persamaan makna dengan tour, yang berarti berputar – putar dari suatu tempat ketempat lain. Suwanto (dalam Suyitno, 2001:37) Pariwisata adalah Perubahan tempat tinggal seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Sedangkan menurut Undang-Undang no. 10/2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional maupun global.

Hunzieker dan Karpf pariwisata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jaringan dan gejala – gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing disuatu tempat dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal disitu untuk melakukan suatu pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara (dalam Suryadana, M.l. et al. 2015:30).

Menurut Buchli (dalam Yoeti, 1996:47) yang dimaksud pariwisata adalah setiap peralihan tempat untuk sementara waktu dan mereka yang mengadakan perjalanan tersebut memperoleh pelayanan dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri pariwisata. Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, maupun untuk tujuan lainnya (Spillane, 1994:28).

Menurut UU no. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan kepariwisataan adalah sebagai berikut :

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
5. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya,

dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
9. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
10. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
11. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

12. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
13. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan
16. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk` memenuhi kebutuhan pariwisata.
17. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomer 3 Tahun 2010 pasal 4

kepariwisataan bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
2. Menghapus kemiskinan
3. Mengatasi pengangguran
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
5. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
6. Melestarikan dan memajukan kebudayaan serta perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan

7. Memupuk rasa cinta tanah air
8. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
9. Mengangkat citra bangsa
10. Mempererat persahabatan antar bangsa

Seseorang dapat melakukan perjalanan dengan berbagai cara karena alasan yang berbeda-beda pula. Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan yaitu (Spillane, 1994:30,31):

1. Harus bersifat sementara
2. Harus bersifat sukarela (voluntary) dalam arti tidak terjadi karena dipaksa.
3. Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran.

Spillane (dalam Suryadana, et al. 2015:41) menambahkan bahwa tujuan wisata juga harus memiliki lima unsur penting yaitu:

1. Attraction yaitu hal – hal yang menarik perhatian wisatawan
2. Facilities yaitu fasilitas – fasilitas yang diperlukan
3. Infrastructure
4. Transportation atau jasa transportasi
5. Hospitality atau keramahan/ kesediaan untuk menerima tamu

### **Bentuk Pariwisata**

Setelah kita membicarakan dasar pemikiran tentang konsep atau definisi pariwisata, maka perlu kiranya juga dibicarakan tentang bentuk – bentuk wisata ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Bentuk – bentuk ini dapat dibagi menurut kategori dibawah ini:

1. Menurut asal wisatawan

Pertama tama perlu diketahui apakah asal wisatawan ini dari dalam atau luar negeri. Kalau asalnya adalah dalam negeri sendiri yang berarti bahwa sang wisatawan ini hanya pindah tempat sementara didalam lingkungan wilayah negerinya sendiri selama ia mengadakan perjalanan, maka ini dinamakan pariwisata domestic, sedangkan kalau ia datang dari luar negeri dinamakan pariwisata internasional.

2. Menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran

Kedatangan wisatawan dari luar negeri adalah membawa mata uang asing. Pemasukan valuta asing ini berarti memberi efek positif terhadap neraca pembayaran luar negeri suatu Negara yang dikunjungi wisatawan ini disebut pariwisata aktif. Sedangkan kepergian seorang warga negara ke luar negeri memberikan efek negatif terhadap neraca pembayaran luar negeri negaranya. Ini dinamakan pariwisata pasif.

3. Menurut jangka waktu

Kedatangan seorang wisatawan disuatu tempat atau Negara diperhitungkan pula menurut waktu lamanya ia tinggal ditempat atau negara yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan istilah –istilah pariwisata jangka pendek dan pariwisata jangka panjang, yang mana tergantung pada ketentuan – ketentuan yang diberikan oleh suatu Negara untuk mengukur pendek atau panjangnya waktu yang dimaksud.

4. Menurut jumlah wisatawan



Perbedaan ini diperhitungkan atas jumlahnya wisatawan yang datang, apakah sang wisatawan datang sendiri atau dalam suatu rombongan. Maka timbulah istilah – istilah pariwisata tunggal dan pariwisata rombongan.

#### 5. Menurut alat angkut yang dipergunakan

Dilihat dari segi penggunaan alat pengangkutan yang dipergunakan oleh sang wisatawan, maka kategori ini dapat dibagi menjadi pariwisata udara, pariwisata laut, pariwisata kereta api, atau mobil (Suwandi, 1994:39-40).

#### **Jenis Pariwisata**

Spillane (dalam Sugianto, 2000:20) menyatakan bahwa motif- motif dalam pariwisata sangat bervariasi dan mempunyai pengaruh yang menentukan pada daerah tujuan wisatayang akan dikunjungi. Perbedaan motif tersebut tercermin dengan adanya berbagai jenis pariwisata. Walaupun banyak jenis wisata ditentukan menurut motif tujuan perjalanan, namun dapat pula dibedakan adanya beberapa jenis pariwisata khusus, yaitu :

##### 1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (Pleasure tourism)

Pariwisata jenis ini dilakukan oleh orang yang meninggalkan tempat tinggalnya dengan tujuan untuk berlibur, memenuhi keingin- tahuannya, mengendorkan syaraf-syaraf yang tegang, maupun untuk melihat sesuatu yang baru, untuk menikmati keindahan alam, untuk mengetahui hikayat rakyat setempat, untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian di daerah luar kota, atau bahkan sebaliknya untuk menikmati hiburan di kota-kota besar ataupun untuk ikut serta dalam keramaian pusat-pusat wisatawan.

##### 2. Pariwisata untuk rekreasi (Recreation tourism)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk tujuan beristirahat, memulihkan kondisi jasmani dan rohaninya, maupun untuk menyegarkan keletihan dan kelelahannya. Biasanya mereka akan tinggal selama mungkin di tempat-tempat wisata agar menemukan kenikmatan yang diperlukan.

3. Pariwisata untuk kebudayaan (Cultural tourism).

Jenis pariwisata ini ditandai dengan motivasi, seperti ingin belajar di pusat penelitian dan riset, untuk mempelajari adat istiadat dan kelembagaan dari daerah yang berbeda, untuk mengunjungi monumen bersejarah, untuk mengunjungi pusat kesenian, pusat-pusat keagamaan, maupun ikut serta dalam festival- festival seni musik.

4. Pariwisata untuk olahraga (Sport tourism)

Jenis pariwisata ini bertujuan untuk olahraga. Jenis pariwisata ini dapat dibagi dalam dua kategori :

a. Big Sport Events, yaitu pariwisata-pariwisata olahraga besar yang menarik perhatian tidak hanya pada olahragawannya sendiri, tetapi juga ribuan penonton atau penggemarnya.

b. Sporting Tourism of the Practitioners, yaitu pariwisata olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktikan sendiri. Negara yang memiliki banyak fasilitas atau tempat-tempat olahraga seperti ini tentu dapat menarik sejumlah besar penggemar jenis olahraga pariwisata ini.

5. Pariwisata untuk urusan dagang (Bussines tourism)

Pariwisata jenis ini menekankan pada pemanfaatan waktu luang oleh pelakunya disela-sela kesibukan bisnis yang sedang dijalani. Biasanya waktu luang tersebut akan dimanfaatkan untuk mengunjungi berbagai obyek wisata yang ada di daerah tujuan.

#### 6. Pariwisata untuk berkonvensi (Convention tourism)

Motif pariwisata jenis ini biasanya dilatar belakangi oleh adanya agenda rapat atau konferensi yang biasanya dihadiri oleh banyak orang dari berbagai daerah atau negara yang berbeda, sehingga mengharuskan untuk tinggal beberapa hari di daerah atau negara penyelenggara konferensi tersebut.

### 2.2 Kebijakan Publik

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eystone dikutip dari (Winarno, 2008:79). Ia mengatakan bahwa "secara luas" kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai "hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya". Konsep yang ditawarkan Eystone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang di maksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Kebijakan publik dalam definisi mashur dari dye adalah "*whatever government chose to do or not to do*". Maknanya dye hendak menyatakan bahwa pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan apa saja yang tidak dilakukan pemerintah Thoha (dalam Suharto, 2010:44). James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor atau serangkaian aktor dalam suatu bidang atau kegiatan tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan memang tidak lepas dari kaitan kepentingan

antar kelompok, baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum Anderson (dalam Suharto, 2010:44). Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik, ada baiknya jika kita membahas berbagai konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik Young dan Quin (dalam Suharto, 2010:44,45):

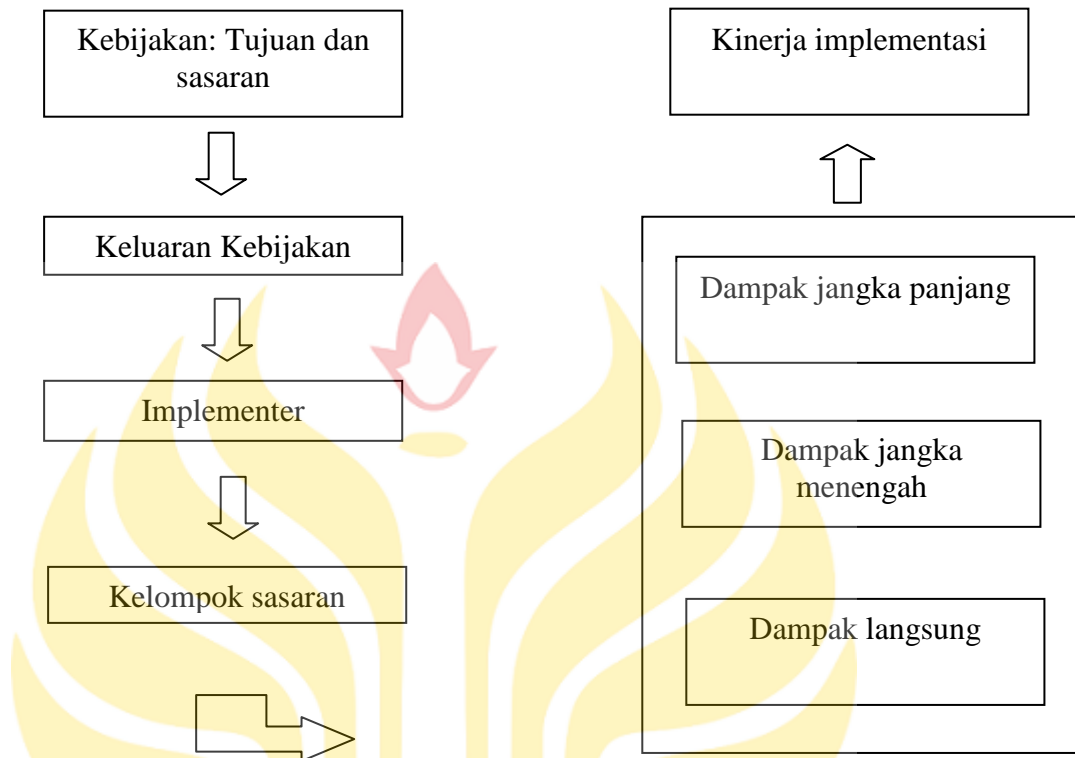
1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan financial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau startegi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa actor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah – langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah

maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Model Deliberatif atau musyawarah pada kebijakan kebijakan dikembangkan oleh Haier Wagwenaar dikutip dari (Handoyo, 2012:54,55). Model ini disebut juga sebagai collaborative policy making. Proses kebijakan publik model deliberatif ini berbeda dengan model teknokratik, karena peran analis kebijakan hanya menjadi fasilitator agar masyarakat dapat menemukan sendiri keputusan kebijakan yang menyangkut dirinya. Peran Pemerintah sebagai legislator kehendak public, berperan sebagai prosesor proses dialog public yang menghasilkan keputusan public untuk dijadikan kebijakan public. Pressman dan Wildavsky sebagai pelopor studi implementasi memberikan definisi sesuai dekadenya. Menurut mereka, implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (to carry out), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (to produce), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (to complete). Dari berbagai kata kunci yang mulai digunakan untuk mendefinisikan implementasi tersebut, Van Meter dan Horn (dalam Purwanto, et al.2015:20) mendefinisikan implementasi secara lebih spesifik, yaitu: "Policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions".

Dalam perkembangan berikutnya, pemaknaan terhadap implementasi terus mengalami perkembangan. Bagi para peneliti generasi III, contohnya, implementasi dipahami secara lebih kompleks sebagai sebuah transaksi (pertukaran) berbagai sumber daya yang melibatkan banyak stakeholder. Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh implementer kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Karena lebih komprehensif dalam memahami bagaimana realita implementasi suatu kebijakan yang sesungguhnya terjadi, perspektif kedua (what's happening) sebagaimana disebutkan oleh Ripley (dalam Purwanto, et al. 2015:71) di depan lebih banyak dipakai sebagai acuan oleh para ahli implementasi. Perspektif tersebut memang lebih membantu para peneliti yang berusaha untuk menjelaskan bagaimana realitas implementasi suatu kebijakan, yaitu bagaimana setelah melalui serangkaian proses yang panjang suatu kebijakan kemudian mampu mewujudkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Apabila disepakati bahwa cara melihat keberhasilan implementasi tidak hanya berhenti pada kepatuhan para implementer saja namun juga hasil yang dicapai setelah prosedur implementasi dijalani maka upaya untuk memahami realitas implementasi kebijakan perlu dilihat secara lebih detil dengan mengikuti proses implementasi yang dilalui para implementer dalam upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut. Proses panjang tersebut apabila diringkas akan terlihat seperti gambar berikut:



Bagan 2.1  
Proses Implementasi (Purwanto, et al..2015:72)

Dikutip dari (Purwanto, E.A. et al. 2015:72) Suatu kebijakan atau program diformulasikan dengan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut maka suatu kebijakan membutuhkan masukan-masukan kebijakan (policy input). Masukan kebijakan yang umum dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan public adalah berupa anggaran, misalnya: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai berbagai kebijakan yang dirancang oleh pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai berbagai pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota.



Kebijakan pariwisata umumnya dipandang sebagai bagian dari kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi berhubungan dengan struktur dan pertumbuhan ekonomi yang biasanya diwujudkan dalam perencanaan pariwisata. Beberapa faktor kunci yang menjadi perhatian kebijakan ekonomi misalnya ketenagakerjaan, investasi dan keuangan, industri, dan perdagangan Gee dalam (Suardana 2013). Lebih lanjut Gee dalam (Suardana 2013) menjelaskan bahwa formulasi kebijakan pariwisata merupakan tanggung jawab penting yang harus dilakukan oleh pemerintah yang ingin mengembangkan atau mempertahankan pariwisata sebagai bagian yang integral dalam perekonomian.

Gee dalam (Suardana 2013) lebih tegas dijelaskan kebijakan umumnya mengacu pada rencana, keseluruhan tingkat tinggi yang mencakup tujuan dan prosedur. Untuk itu kebijakan publik, memperhitungkan hasil akhir yang diinginkan dari pemerintah dan metode untuk mencapai hasil tersebut. Kebijakan mewujudkan tujuan dan strategi yang telah diadopsi pemerintah sehubungan dengan pariwisata, pembangunan ekonomi, pekerjaan, hubungan politik, atau, kombinasi dari ketiganya. Karenanya keterlibatan sektor public sangat penting dalam penentuan kebijakan pariwisata.

Biederman dalam (Suardana 2013) menambahkan hal penting dalam definisi kebijakan kepariwisataan dengan mengemukakan bahwa prinsip dari kebijakan kepariwisataan adalah harus menjamin negara maupun daerah mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kontribusi sosial dan ekonomi yang diberikan pariwisata. Biederman juga menyebutkan bahwa sasaran akhir dari

kebijakan pariwisata adalah peningkatan kemajuan negara atau daerah dan kehidupan warga negaranya.

Menurut Gun and Var dalam (Suardana 2013) menyebutkan ruang lingkup kebijakan pariwisata nasional telah menjadi alat promosi untuk menarik kunjungan wisatawan. Kebijakan yang dibuat semua untuk usaha peningkatan citra destinasi wisata. Dalam dekade terakhir kerjasama dan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan swasta semakin kuat. Kebijakan pengembangan pariwisata perlu dilaksanakan oleh sektor swasta serta sektor publik. Untuk itu sinergi antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat sangat diperlukan dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata.

Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus memiliki pilihan untuk melakukan sesuatu yang konstruktif tentang kebijakan pariwisata. Hal ini merupakan peluang dan sekaligus kewajiban untuk membuat, mengimplementasikan dan memelihara dengan baik sebuah kebijakan yang dibuat. Hal yang paling penting adalah koordinasi dengan sektor swasta dan pemerintah untuk menghindari kekhawatiran terhadap kesejahteraan publik (Gun and Var (2002: 117 ). Menurut Richter & Richter (Michael Hall, 2000;25) hampir secara universal pemerintah di dunia menerima pariwisata yang memiliki dampak positif, sehingga kebijakan pariwisata di buat untuk memperluas industri pariwisata.

## **Pengembangan Pariwisata**

Pengembangan pariwisata merupakan suatu kebijakan publik, karena pariwisata merupakan hasil pilihan pemerintah dan hak dari pemerintah untuk mengembangkan dan mengontrol pengembangan tersebut. Pengembangan pariwisata juga merupakan kebijakan pemerintah dalam memecahkan masalah yang dihadapi, Pariwisata dipandang untuk mendapatkan sumber pendapatan baru bagi suatu negara.

Pengembangan pariwisata tidak lepas dari perkembangan politik, ekonomi, sosial dan pengembangan disektor lainnya, maka didalam pengembangan pariwisata dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu. Gee dalam (Suardana 2013) menjelaskan bahwa formulasi kebijakan pariwisata merupakan tanggung jawab penting yang harus dilakukan oleh pemerintah yang ingin mengembangkan atau mempertahankan pariwisata sebagai bagian yang integral dalam perekonomian. Dari pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah suatu proses yang terjadi secara terus menerus, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya terhadap ancaman yang ada untuk dapat berkembang dalam mencapai tujuan individu dalam organisasi dan tujuan organisasi secara keseluruhan Demartoto (dalam Suryadana, et al. 2015:41).

Dalam pengembangan pariwisata juga diperlukannya publikasi dan promosi. publikasi dan promosi bertujuan untuk memberitahukan kepada orang banyak atau kelompok tertentu bahwa ada produk yang ditawarkan atau dijual. Agar dapat menarik pembeli produk itu harus diperkenalkan, apa kelebihanannya dari produk – produk yang lain dimana dapat membeli produk tersebut. Publikasi

lebih banyak ditujukan kepada pembeli potensial yang belum diketahui, sedangkan promosi ditujukan kepada pembeli potensial yang telah diketahui identitasnya. Pada dasarnya tujuannya tidak lain ialah :

1. Memperkenalkan jasa –jasa dan produk yang dihasilkan industry pariwisata seluas mungkin.
2. Member kesan daya tarik sekuat mungkin dengan harapan agar orang akan banyak datang untuk berkunjung.
3. Menyampaikan pesan yang menarik dengan cara jujur untuk menciptakan harapan – harapan yang tinggi.

Dalam pengembangan pariwisata dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan usaha – usaha membuat rencana, membuat ikhtisar yang lengkap dan terperinci mengenai segala sesuatu yang dioerlukan untuk dikerjakan dengan cara bagaimana melaksanakannya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan pariwisata pada hakikatnya adalah kegiatan untuk memberikan bayangan atau gambaran atas wisata yang akan diselenggarakan. Yoeti (dalam Suryadana, et al. 2015:30-31) mengungkapkan beberapa prinsip perencanaan pariwisata, diantaranya:

1. Perencanaan harus memiliki satu kesatuan dengan pembangunan regional atau nasional dari pembangunan perekonomian suatu negara.
2. Perencanaan pengembangan kepariwisataan menghendaki pendekatan terpadu dengan sektor-sektor lainnya, terutama sektor pertanian, jasa, perdagangan, dan sektor transportasi.

3. Perencanaan suatu daerah tujuan pariwisata harus berdasarkan suatu studi yang khusus dibuat untuk daerah tersebut dan dengan memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan alam serta budaya di daerah yang bersangkutan.
4. Perencanaan pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah harus diikuti oleh adanya perencanaan fisik daerah yang bersangkutan secara keseluruhan.
5. Perencanaan fisik suatu daerah untuk tujuan pariwisata tidak hanya memperhatikan segi administrasi saja tetapi juga didasarkan atas penelitian yang sesuai dengan lingkungan alam sekitar, faktor geografis dan ekologi dari daerah yang bersangkutan.

Menurut Inskeep (dalam Suryadana, M.I. et al. 2015:33), diberbagai macam literature dimuat berbagai macam komponen wisata. Namun ada beberapa komponen wisata yang ada dan merupakan komponen dasar dari wisata. Komponen – komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Komponen - komponen wisata tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Atraksi dan kegiatan – kegiatan wisata

Kegiatan – kegiatan wisata yang dimaksud dapat berupa semua hal yang berhubungan dengan lingkungan alami, kebudayaan keunikan suatu daerah dan kegiatan – kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan wisata yang menarik wisatawan untuk mengunjungi sebuah obyek wisata.

## 2. Akomodasi

Akomodasi yang dimaksud adalah berbagai macam hotel dan berbagai jenis fasilitas lain yang berhubungan dengan pelayanan untuk para wisatawan yang berniat untuk bermalam selama perjalanan wisata yang mereka lakukan.

## 3. Fasilitas dan Pelayanan wisata

Fasilitas dan pelayanan wisata yang dimaksud adalah semua fasilitas yang dibutuhkan dalam perencanaan kawasan wisata. Fasilitas tersebut termasuk tour and travel operations (disebut juga pelayanan penyambutan).

## 4. Fasilitas dan pelayanan transportasi

Meliputi transportasi akses dari dan menuju kawasan wisata, transportasi internal yang menghubungkan atraksi utama kawasan wisata dan kawasan pembangunan, termasuk semua jenis fasilitas dan pelayanan yang berhubungan dengan transportasi darat, air dan udara.

## 5. Infrastruktur lain

Infrastruktur yang dimaksud adalah penyediaan air bersih, listrik, drainase, saluran air kotor, telekomunikasi (seperti telepon, telegram, telex, faksimili dan radio).

## 6. Elemen kelembagaan

Kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan yang diperlukan untuk membangun dan mengelola kegiatan wisata, termasuk perencanaan tenaga kerjadan progam pendidikan dan pelatihan; menyusun startegi marketing dan progam promosi; menstukturisasi organisasi wisata sektor umum dan swasta; peraturan dan perundangan yang berhubungan dengan wisatamenentukan

kebijakan penanaman modal bagi sektor public dan swasta; mengendalikan program ekonomi, lingkungan dan sosial kebudayaan.

Dalam melakukan pengembangan kepariwisataan, perlu dilakukan pendekatan terhadap organisasi pariwisata yang ada (baik pemerintah, masyarakat, dan swasta) serta pihak-pihak terkait guna mendukung kelangsungan pembangunan pariwisata di daerah tersebut Demartoto (dalam Suryadana, M.I. et al. 2015:33). Oleh karena itu, dalam perencanaan kepariwisataan dibutuhkan perumusan yang cermat dan diambil kata sepakat, apa yang menjadi kewajiban pemerintah dan mana yang menjadi tanggung jawab pihak swasta, sehingga dalam pengembangan selanjutnya tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan perbedaan antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Konsep pengembangan pariwisata sangat berkaitan dengan kebijakan publik, dalam pengembangan kepariwisataan dibutuhkan perumusan yang tepat dari Pemerintah, karena dalam pengembangan pariwisata dibutuhkan kebijakan dari pemerintah. Pemerintah mengatur ketetapan tentang pariwisata sesuai dengan keadaan yang ada dan pengelola pariwisata harus mengembangkan pariwisata sesuai kebijakan dari pemerintah.

### **Pengelolaan Pariwisata**

Pengelolaan merupakan suatu proses yang membantu merumuskan kebijakan dan pencapaian tujuan. Peran pemerintah dalam pengelolaan pariwisata, seperti melaksanakan pembinaan kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Hayun (dalam Damanik, et al. 2005). Arti dari kata pengelolaan oleh beberapa



orang sering disamakan dengan arti manajemen, dimana tujuan dari manajemen dan pengelolaan adalah sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan dapat diartikan sebagai proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya baik manusia maupun teknikal, untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetapkan dalam suatu organisasi (Murniati, dalam <http://carapedia.com>). Pengertian lain tentang pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata kelola mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya Harsoyo (dalam Suwanto, 2004:54). Dari kedua pendapat ahli tersebut lebih dikuatkan lagi dengan pengertian pengelolaan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang berisikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Wardoyo, 1980).

Pengelolaan pariwisata haruslah pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjadikan pariwisata tersebut sebagai daya tarik bagi wisatawan. Menurut Dutton dan Hall (dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata) pengelolaan berkelanjutan adalah pengelolaan yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia saat ini, tanpa mengorbankan potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa mendatang. Pada kondisi ekologis tersebut seharusnya ditambahkan faktor-faktor sosial yang berpengaruh langsung pada keberlanjutannya interkasi antara kelompok masyarakat dan lingkungan fisiknya.

Obyek dan daya tarik wisata umumnya terdiri atas hayati dan non hayati, dimana masing-masing memerlukan pengelolaan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya. Pengelolaan obyek dan daya tarik wisata harus memperhitungkan berbagai sumber daya wisatanya secara berdaya guna agar tercapainya sasaran yang diinginkan. Dalam menunjang pengelolaan berbagai kegiatan kepariwisataan, teknologi manajemen perlu diterapkan agar sumber daya wisata yang murni alami dapat direkayasa secara berhasil guna, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitasnya termasuk lingkungan alamnya.

Sekalipun masuk kedalam kualifikasi perdagangan, namun jasa pariwisata di Indonesia tidak termasuk obyek kebijakan Departemen Perdagangan, melainkan obyek kebijakan Departemen Pariwisata. Departemen Pariwisata merupakan departemen khusus yang dibentuk pemerintah Indonesia untuk mengelola kepariwisataan secara keseluruhan, termasuk jasa pariwisata. Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan, komunitas lokal, dan nilai-nilai sosial daerah tersebut sehingga wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar daerah pariwisata. Menurut Cox (dalam Pitana, et al. 2009) pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan local dan special local sense yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.

2. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis kepada keunikan budaya dan lingkungan lokal.
5. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam pengelolaan Pemerintah Daerah memiliki hak yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomer 3 Tahun 2010 pasal 19 :

1. Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Daerah berhak mendapatkan data dan informasi kegiatan usaha pariwisata yang dilakukan oleh Badan Usaha dan perorangan.

Pengelolaan Grand Maerakaca sendiri dikembangkan oleh pihak Swasta/mandiri. Setiap pengusaha pariwisata juga memiliki hak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomer 3 Tahun 2010 pasal 20 :

1. Mendapatkan kemudahan pelayanan dari Pemerintah Daerah
2. Memperoleh kesempatan yang sama dalam melakukan usaha pariwisata
3. Terdaftar sebagai pelaku usaha pariwisata

4. Mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan
6. Mendapat perlindungan hukum dalam melakukan kegiatan usahanya.

### **2.3 Politik Keuangan Daerah**

Pariwisata merupakan sebuah produk dan terkait dengan berbagai aspek. Sebagai industri perdagangan jasa, kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu; perencanaan (planning) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (development) fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (policy) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (regulation). Industri pariwisata dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang sangat besar baik bagi negara, bagi wilayah setempat yang bersangkutan, maupun bagi negara asal dari para wisatawan yang datang berkunjung. Meningkatnya jumlah wisatawan menjadikan pendapatan perekonomian dari wilayah tersebut dapat meningkat dan sejalan dengan meningkatnya perekonomian di masing-masing wilayah Indonesia maka secara otomatis meningkat pula perekonomian di negara Indonesia

Masyarakat wajib membayar pajak, karena pajak merupakan sumber pembiayaan terbesar bagi Negara. UU APBN merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. RUU APBN atau RAPBN sendiri disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan

dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sektor swasta, baik perorangan maupun badan usaha, dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya juga akan terikat kewajiban yang sama dalam hal pembayaran dan pelaporan perpajakan yang menjadi tanggung jawabnya. Bahkan setiap belanja barang/jasa/modal yang bersumber dari dana APBN/APBD juga terdapat kewajiban untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Dengan melihat besarnya prosentase penerimaan perpajakan sebagai penopang belanja negara, menunjukkan bahwa jalannya roda pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik menjadi terganggu apabila penerimaan perpajakan tidak sepenuhnya dapat terealisasi. Yang kemudian juga akan mengganggu aktivitas pihak-pihak swasta atau masyarakat sehari-hari. Akhirnya kembali lagi, ketika aktivitas ekonomi terganggu, secara langsung akan mengakibatkan jumlah penghasilan menurun dan pajak yang dibayarkan semakin kecil.

Sektor pariwisata termasuk dalam kategori Retribusi yang dibayarkan ke daerah masing-masing. Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi guna stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan.

Selain itu juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah yang pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat di daerah. Peranan keuangan daerah akan dapat meningkatkan kesiapan daerah untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab.

(Mamesah 1995: 16) mengemukakan bahwa keuangan negara ialah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kekayaan daerah ini sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemerintah daerah sebagai sebuah institusi publik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana atau modal untuk dapat membiayai pengeluaran pemerintah tersebut government expenditure terhadap barang-barang publik (public goods) dan jasa pelayanan. Tugas ini berkaitan erat dengan kebijakan anggaran pemerintah yang meliputi penerimaan dan pengeluaran. Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab memerlukan dana yang cukup dan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dana tersebut diperoleh melalui kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan. Oleh karena itu,

keuangan daerah merupakan tolak ukur bagi penentuan kapasitas dalam menyelenggarakan tugas-tugas otonomi, di samping tolak ukur lain seperti kemampuan sumber daya alam, kondisi demografi, potensi daerah, serta partisipasi masyarakat.

Tujuan utama pengelolaan keuangan daerah, yaitu (1) tanggung jawab, (2) memenuhi kewajiban keuangan, (3) kejujuran, (4) hasil guna, dan (5) pengendalian (Binder, 1984: 279). Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah saat ini, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2000: 3) :

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (public oriented). Hal tersebut tidak hanya terlihat dari besarnya pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat dari besarnya partisipasi masyarakat (DPRD) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan daerah.
2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.
3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran serta dari partisipasi yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, Kepala Daerah, Sekda dan perangkat daerah lainnya.
4. Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas.



5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah, dan PNS, baik rasio maupun dasar pertimbangannya.
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan.
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang-barang daerah yang lebih profesional.
8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada publik.
9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi, sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi.

## **2.4 Penelitian yang Relevan**

- 2.4.1 Hani Agustina Prasetyani. 2014. Strategi Pengembangan Puri Maerokoco Taman Wisata Budaya Jawa Tengah. Universitas Diponegoro.**

Hasil penelitian bertujuan untuk menganalisis strategi yang tepat untuk pengembangan obyek wisata Puri Maerokoco. Analisis strategi pengembangan

obyek wisata Puri Maerokoco meliputi aspek ekonomi, infrastruktur, manajemen dan promosi. Hasil analisis ANP menunjukkan bahwa dari keempat aspek pengembangan obyek wisata Puri Maerokoco, menghasilkan aspek ekonomi sebagai prioritas utama dan strategi pengembangan yang tepat untuk dilakukan adalah bekerjasama dengan investor. Rekomendasi strategi bekerjasama dengan investor merupakan strategi dengan prioritas paling tinggi.

**2.4.2 Ilham Surgawi. 2016. Analisis Pengaruh Produk Wisata, Persepsi Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Wisatawan Dalam Mengunjungi Objek Wisata (studi pada objek wisata Puri Maerokoco). Universitas Diponegoro.**

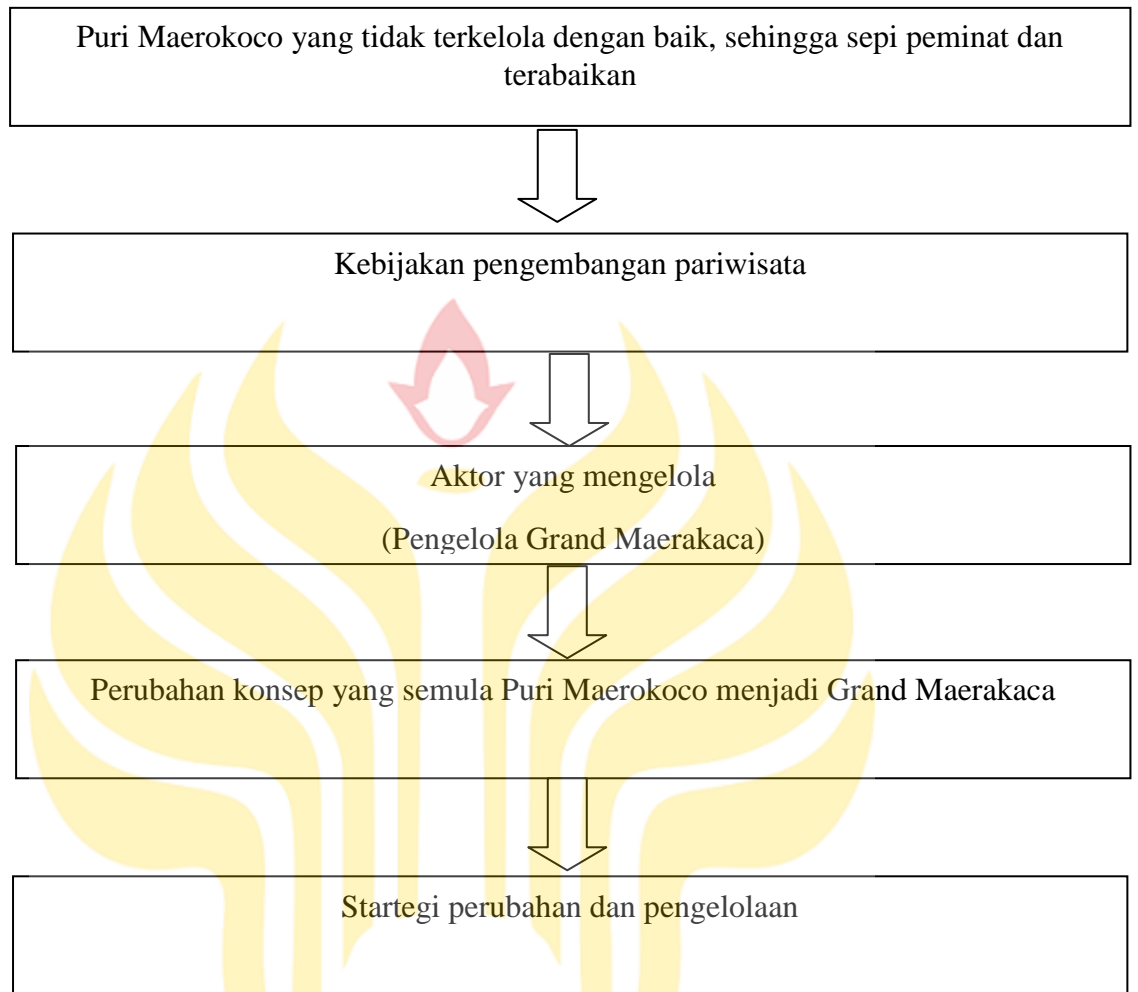
Hasil penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh produk wisata, persepsi harga dan promosi terhadap keputusan wisatawan dalam mengunjungi objek wisata Puri Maerokoco. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Puri Maerokoco. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang meliputi produk wisata, persepsi harga dan promosi berpengaruh secara positif terhadap variabel dependen yaitu keputusan berkunjung yang dilakukan dengan menggunakan uji t. Kemudian melalui uji F menunjukkan bahwa ketiga variabel independen layak untuk menguji variabel dependen. Angka *Adjusted R Square* sebesar 0,393 yang menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan 39,3% variabel dependen yaitu keputusan berkunjung, sedangkan sisanya sebesar 60,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

**2.4.3 Nurul Fatimah. 2008. Pengelolaan Pengembangan Pariwisata Budaya di Kota Semarang (Studi Kasus Terhadap Obyek Wisata Puri Maerokoco). Forum Ilmu Sosial, Vol. 35 No. 1 Juni 2008.**

Pengelolaan objek wisata Maerokoco, masih terdapat beberapa hal yang mempengaruhi tingkat penurunan jumlah pengunjung. Beberapa hal tersebut, di antaranya: kurang tersedianya dana untuk biaya perawatan, kurangnya kesadaran dari penghuni anjungan mengenai fungsi display itu sendiri, pengaruh alamiah karena lokasi daerah rawa sehingga rentan terkena banjir dan rob, kurangnya sosialisasi dan promosi yang lebih gencar sehingga belum banyak dikenal orang dan tidak bisa bertahan diantara objek wisata baru yang bermunculan, ketidakjelasan sertifikasi dan kepemilikan lahan, dan sebagainya. Kurangnya koordinasi antar pengelola dengan penghuni dan pedagang. Atau pedagang dengan pedagang, atau penghuni anjungan yang satu dengan penghuni yang lain. Sehingga sewaktu-waktu ada masalah tidak bisa segera diselesaikan, dan menjadi berlarut-larut.\

### **2.5 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan kerangka konseptual yang memaparkan dimensi-dimensi utama dari penelitian, faktor-faktor kunci, variabel-variabel yang berhubungan yang disusun dalam bentuk narasi dan grafis, sebagai pedoman kerja, baik dalam menyusun metode pelaksanaan di lapangan maupun pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan landasan teori dan beberapa definisi yang ada, maka kerangka berpikir yang ada dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 2.2

Kerangka Berpikir Penelitian

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Perubahan Puri Maerokoco menjadi Grand Maerakaca untuk Meningkatkan Jumlah PAD dan Jumlah Wisatawan di Jawa Tengah. maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Perubahan konsep dari Puri Maerokoco menjadi Grand Maerakaca berhasil karena setelah dilakukan perubahan jumlah pengunjung mengalami peningkatan yang signifikan. Setelah dilakukan pengelolaan yang baik dan serius Grand Maerakaca yang telah dikembangkan memiliki banyak wisata menarik. Berkembangnya Grand Maerakaca sukses menarik minat pengunjung, terbukti setelah dibukannya Grand Maerakaca jumlah wisatawan meningkat secara dratis dan melampaui target.
2. Sistem pengelolaan yang dulu kurang begitu diperhatikan, setelah dilakukan perubahan konsep dilakukan perbaikan dalam penataan dan penambahan fasilitas seperti seperti sepeda air, miniatur, pasar apung, outbond, Trekking Mangrove dan sebagainya dapat menarik minat pengunjung.
3. PT. PRPP selaku pengelola Grand Maerakaca yang merupakan BUMD Jawa Tengah wajib memberikan deviden kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. PT. PRPP selaku pengelola Grand Maerakaca memiliki kewajiban memberikan deviden ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu jika memang kondisi PT. PRPP sudah layak / memiliki keuntungan baru ada kewajiban

untuk memberikan keuntungan. Walaupun lahan PT. PRPP masih sengketa tetapi tidak mempengaruhi dalam pemberian deviden. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 pasal 9 Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PT. PRPP) mendapatkan sebesar Rp.39.252.200.000 dari modal dasar sebesar Rp. 50.000.000.000.

4. PT. PRPP merupakan BUMD milik Provinsi dan Kabupaten Kota jadi bentuk pertanggung jawabannya melalui rapat umum pemegang saham, yang setiap tahun di selenggarakan dalam RUPS. Semua kegiatan program yang dilaksanakan 1 tahun ke belakang dan rencana program 1 tahun ke depan yang akan dilaksanakan, di laporkan dan informasikan ke pemegang saham melalui RUPS (rapat umum pemegang saham). Pemerintah tidak terlalu berperan penuh terhadap Grand Maerakaca karena PT. PRPP memiliki rumahnya sendiri. Dalam pengelolaan Grand Maerakaca antara pihak pengelola dengan pemerintah menerapkan Model Delebiratif. peran analis kebijakan hanya menjadi fasilitator agar masyarakat dapat menemukan sendiri keputusan kebijakan yang akan diambil. Pada dasarnya pihak pengelola Grand Maerakaca mengatur semuanya secara sendiri tetapi dalam proses berkembangnya tetap memerlukan ijin dari pemerintah.
5. Walaupun PT. PRPP selaku pengelola Grand Maerakaca terus mengalami keuntungan sejak 2015, jumlah wisatawan dan pendapatan Grand Maerakaca juga terus meningkat. Tetapi PT. PRPP belum bisa memberikan deviden kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Karena masih memiliki kerugian kumulatif yang dialami selama Grand Maerakaca belum berkembang. Pada

tahun 2019 PT. PRPP sudah akan mulai membayarkan deviden kembali ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena sudah bisa menutupi kerugian kumulatifnya.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diajukan terkait dengan temuan pada hasil penelitian ini antara lain adalah:

1. Kepada pihak pengelola Grand Maerakaca walaupun Grand Maerakaca sudah berkembang cukup bagus dan memiliki inovasi – inovasi baru, pengelola bisa menambahkan taman bunga warna - warni yang rapi agar dapat lebih menarik minat wisatawan.
2. Kepada pihak Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah diperlukan perhatian lebih kepada wisata wisata yang ada di Jawa Tengah, walaupun wisata di Jawa Tengah jumlahnya sangat banyak. Sebaiknya pemerintah memberikan kontribusi penuh kepada wisata yang cukup potensial untuk berkembang seperti Grand Maerakaca.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Suwandi, P.N. 1994. *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Sederhana*. Jakarta: PT Anem Kosong Anem.
- Sugianto, Rony. 2000. *Pariwisata: Antara Obsesi dan Realita*. Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Medpress.
- Yoeti, O.A. 1996. *Pemasaran Pariwisata Terpadu*. Bandung: Angkasa Bandung.
- Damanik, Jonianton. et al. 2005. *Penanggulangan Kemiskina Melalui Pariwisata*. Yogyakarta: Ketel Press.
- Pitana, Gede et al. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Spilane, J.J. 1994. *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suyitno. 2001. *Perencanaan Pariwisata*. Yogyakarta: Kanisius
- Suryadana, Liga. M.I. et al. 2015. *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi offset.
- Ibrahim. 2015. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Putra, I.B.W. 2003. *Hukum Bisnis Pariwisata*. Bandung: Refika Aditama.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. PT Indeks.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Purwanto, E.A. et al. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gavamedia.

### Skripsi:

- Prasetyani, H.A. 2014. *Strategi Pengembangan Puri Maerokoco Taman Wisata Budaya Jawa Tengah*. Universitas Diponegoro. Semarang.

Surgawi, Ilham. 2016. *Analisis Pengaruh Produk Wisata, Persepsi Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Wisatawan Dalam Mengunjungi Objek Wisata (studi pada objek wisata Puri Maerokoco)*. Universitas Diponegoro. Semarang.

Jurnal:

Christiawan, S.H. 2017. *Efektivitas Pengelolaan PT. PRPP Jawa Tengah*. Universitas Diponegoro.

Fatimah, Nurul. 2008. *Pengelolaan Pengembangan Pariwisata Budaya di Kota Semarang (Studi Kasus Terhadap Obyek Wisata Puri Maerokoco)*. Forum Ilmu Sosial, Vol. 35 No. 1 Juni 2008.

Susilawati, Elita. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah*. Jurnal Ilmu & Riset Manajemen Vol. 3 No. 8.

Puspitasari, Puput. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 11.

Peraturan:

Undang–Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang–Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Jenis pajak yang dikelola atau dipungut oleh pemerintah kabupaten / kota.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 pasal 9 tentang Pernyataan modal Pemerintah Daerah kepada Bada Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomer 3 Tahun 2010 pasal 4 tentang Tujuan Kepariwisataaan.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomer 3 Tahun 2010 pasal 19 tentang Pengelolaan pemerintah Daerah .

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomer 3 Tahun 2010 pasal 20 tentang Hak Pengusaha Pariwisata.

Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang

Undang–Undang nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 tentang PAD.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomer 5 Tahun 2011 pasal 6 tentang Pajak Hiburan.